DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

pdf

Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

_______. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2005. diperoleh 11 September 2014 dari

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/public/pdf/Pilar Demokrasi.

Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat

- _____. Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Fachruddin, Fuad. Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Pustaka Alvabet, 2006.
- Gaffar, Janedjri M. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Global Commission on Elections Democracy & Security. Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia. Terj. Yulia Absari. Kofi Annan Foundation, 2012.
- Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legilsasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Junaidi, Veri., dkk. Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek. Didik Supriyanto (Ed.), Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Junaidi, Veri., Khoirunnisa Agustyati dan Ibnu Setyo Hastomo. Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi dan Keterbukaan Publik dalam

- Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Jakarta: Yayasan Perludem, 2013.
- Liddle, R. William. Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik (terj. Nung Katjasungkana), Jakarta: LP3ES, 1992.
- MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Muhtaj, Majda El. Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Netta, Yulia. Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Seri Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan. Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Perbawati, Candra. Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Hukum Nasional. Negara Hukum Kesejahteraan, Seri Monograf, Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Pratimaratri, Uning. Jaminan Aksesibilitasi Bagi Penyandang Cacat Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia. H. Muladi (Eds.), Hak Asasi Mnausia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Ragawino, Begawa. Hukum Tata Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2007.
- Salam, Moch. Faisal. Peradilan Hak Asasi Manusia. Bandung: Penerbit Pustaka, 2005.
- Smith, Rhona K.M., dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. Knut D. Asplund, dkk. (Eds) Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Sujatmoko, Andrey. Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran HAM Berat: Indonesia, Timor Leste dan lainnya. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sukarna. Sistem Politik. Bandung: Alumni, 1981
- Wahidin, Samsul. Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

2. Internet dan lain-lain:

Asshidiqie, Jimly. Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 Nomor 4, 2005.

- Hasan, Muhardi dan Estika Sari. Hak Sipil dan Politik. Demokrasi Vol. IV No.1, 2005.
- Jurnal analisis sosial, Volume 7. Hlm. 11-31, 2002.
- Ryan Bakry, Mohammad. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep *Good Governance* di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Diperoleh 7 September 2014 dari http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135608-T%2027944-Implementasi%20hak-Tinjauan%20literatur.pdf
- Sanusi, Makmur. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Majalah Hukum: Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun XXVII No. 33, 2013.
- Charlyna S. Purba. Karakteristik Pelanggaran Pemilukada (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi 2008-2013), Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X*, 2005. Diperoleh 7 September 2014 dari http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/HAM_Historis_Sosiologis.pdf
- Badan Pusat Statistik http://database.kemsos.go.id/
- Kompas. (2013, 30 Juli). Indonesia Tidak Punya Data Pemilih Disabilitas. Diperoleh 09 Februari 2014 dari http://nasional.kompas.com/read/2013/07/30/1924164/Indonesia.Tidak.Punya.Data.Pemilih.Disabilitas
- Papayungan, Etty,. Pemahaman Pemberdayaan terhadap Penyandang Cacat melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat, diperoleh 15 Agustus 2014 dari http://www.damandiri.or.id/file/ettypapayunganunhasbab3.pdf
- Komisi Pemilihan Umum, Modul Ic Pemilih Untuk Pemula. Diperoleh 11 Agustus 2014 dari http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf
- Institute for Criminal Justice Reform. (2012, 14 Mei). Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. diperoleh 11 September 2014 dari http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/
- Preambule Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang Ditetapkan oleh Revolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966, Paragraf 3, diperoleh 10 Agustus 2014 dari http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c3c7b6791fa4/parent/24213

- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V tentang Pemilihan Umum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. diperoleh pada 10 Desember 2014 dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/naskahko mprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%205.pdf
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII tentang Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. diperoleh pada 10 Desember 2014 dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/naskahko mprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%208.pdf

3. Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Lain:

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Declaration on the Human Rights of Mentally Retarted Persons

Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Couvenant on Civil and Political Rights)

Konvensi Wiena (Vienna Convention and Programme of Action)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Maanusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tetang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 2014.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.